

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1984, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan; Untuk Pimpinan Proyek Penegak Hukum dan Umum*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abu Abdul Halim Ahmad S, 1996, *Suap, Dampak dan Bahayanya; Tinjauan Syar'i dan Sosial*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1983, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta.
- , 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1990, *Peranan Pengawasan dan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, *Korupsi Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Husain Husain Syhatah, 2002, *Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syari'ah*, Amzah Jakarta.
- Ilham Gunawan, 1990, *Postur, Korupsi di Indonesia; Tinjauan Yuridis Sosiologis, Budaya dan Politis*, Angkasa, Jakarta.
- John. A. Gardiner dalam Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-undang Nomor 31/1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Jeremy Phope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor, Jakarta.

- Laden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- LP3 UMY, 2004, *Pendidikan Anti Korupsi*, LP3 UMY, Yogyakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawai. A, 1992, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mubyarto, 1980, *Ilmu Sosial dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, Edisi Kedua, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2000, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- , *et.all*, 2002, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah*, Yayasan Obor Indonesia & Partnership For Governance Reform In Indonesia, Jakarta.
- Singgih, 2002, *Dunia pun memerangi Korupsi; Beberapa Catatan dari International Anti Corruption Coferences I-X dan Dokumen PBB tentang Pemberantasan Korupsi*, Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Tangerang.
- Soeryono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sangsi*, Remaja Karya, Jakarta.
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
- Sudarto, 1985, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Syed Hussein Alatas, 1987, *Korupsi : sifat, Sebab, dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.

-----, dalam Yunahan Ilyas, *et.all*, 2004, *Korupsi Dalam Prespektif Agama-agama*, KUTUB, Yogyakarta.

Topo Santoso, 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy Syamil Pres dan Strafika, Bandung.

Victor M. Situmorang, 1990, *Tindak Pidana PNS*, Rineka Cipta, Cetakan I, Jakarta.

Wasingatu dkk, 2002, *Menyikapi Tabir Mafia Peradilan*, Pelangi Aksara, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Kabar atau Majalah

TN, *Di Balik Pengesahan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK)*, Jawa Pos 21 Juli 2006, hal 6.

TN, *Perlindungan Terhadap Saksi Perkara Korupsi*, Kompas 18 April 2006, hal 7.

Obsidifia Yanto, *Mekanisme Perlindungan Terhadap Saksi di Pengadilan*

R. Triyuli Purwono, *Diskriminasi Hukum Tak Tepat di Era Reformasi Aparat Harus Tegas Sikapi Korupsi*, Manggala Naya Wiwarottama, Edisi Maret 2004, hal. 42.

TN, *Korupsi Pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa*, Manggala Naya Wiwarottama, Edisi Januari 2007, hal. 33.

Situs Internet

"*Perlindungan Saksi dan Korban; Perlindungan Saksi dan Korban di Pengadilan HAM*", di akses tanggal 04 Maret 2007, 19: 08: 48, [http://www. Geogle. Com](http://www.Geogle.Com),

"*Di Balik Pengesahan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK); Agar Saksi Lebih Berani Bicara*", di akses tanggal 11 Maret 2007, 19: 10: 53, [http://www. Geogle. Com](http://www.Geogle.Com),

"*Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Peradilan HAM*", di akses tanggal 13 Maret 2007, 19: 09: 53, [http://www. Yahoo. Com](http://www.Yahoo.Com)

[http://www. Hukumonline. Com.](http://www.Hukumonline.Com), di akses tanggal 14 Maret 2007, 19: 01: 37

[http://www. Anti Korupsi. Com.](http://www.AntiKorupsi.Com), di akses tanggal 10 Maret 2007, 19: 11: 39.

"*Perlindungan Saksi dan bentuk-bentuk Saksi*", di akses tanggal 09 April 2007, 09:10:11, <http://www.elsam.or.id/pdf/Ruu-Perlindungan-Saksi.3.Pdf>

"*Melindungi Saksi Dengan 'Undang-undang*", di akses tanggal 29 April 2007, 16:34:03, [http://www.yahoo.com.](http://www.yahoo.com),

"*Beberapa Catatan Undang-undang Perlindungan Saksi*", di akses 22 Maret 2007, 19:19:12, <http://www.antikorupsi.org/or.id>.